



LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN NOVEMBER TAHUN 2025



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.H.,M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	15
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si	16
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	21
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)	23
BAB III PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

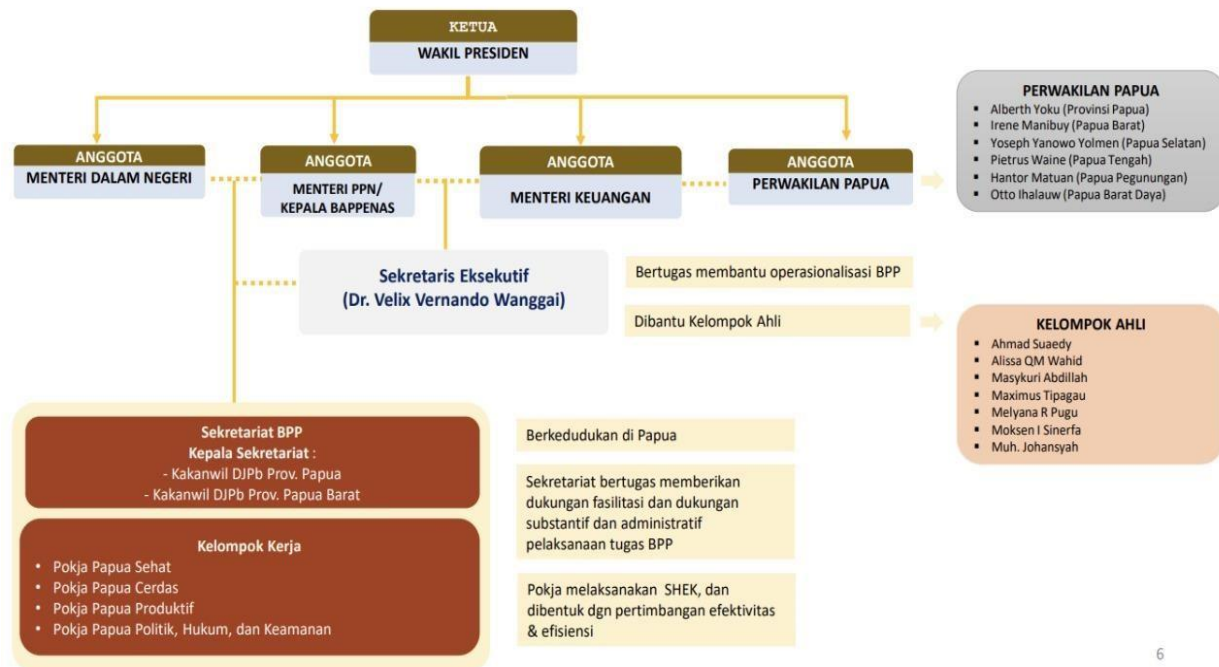
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;

- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan November tahun 2025 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan,S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Lima Wilayah Adat Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis, 14 November 2025 bertempat di Aula Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mensosialisasikan mekanisme dan urgensi pendataan Orang Asli Papua (OAP) di lima wilayah adat. 2. Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya data OAP yang akurat sebagai dasar kebijakan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus. 3. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, LMA, serta masyarakat dalam memastikan pendataan OAP dilakukan secara valid dan terstruktur.
Peserta Kegiatan	:	1. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan 2. Anggota Pokja Papua Sehat 3. Asisten I Bidang SDM Provinsi Papua Pegunungan 4. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan 5. Para Pemateri dan Akademisi 6. Kepala Dinas Dukcapil 8 Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan 7. Badan Pusat Statistik (BPS) 8. Tokoh Adat 9. Tokoh Agama 10. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 11. Perwakilan masyarakat undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Produktif.
Hasil Kegiatan	:	Penyampaian materi sosialisasi mengenai urgensi pendataan OAP sebagai dasar kebijakan dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. Peserta memahami bahwa data

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Minggu–Senin, 16–17 November 2025, Hotel Suni, Jayapura, Papua.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membahas mekanisme rekrutmen anggota Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP di seluruh Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. 2. Menindaklanjuti arahan dan hasil pertemuan sebelumnya di Manokwari bersama Wakil Presiden RI. 3. Memastikan pembentukan Pokja sesuai empat program prioritas: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam.
Peserta Kegiatan	:	1. Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura 2. Kepala Sekretariat BPP Manokwari 3. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua 4. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan 5. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah 6. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan 7. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat 8. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	1. Telah dilaksanakannya pembahasan menyeluruh mengenai mekanisme rekrutmen anggota Pokja BP3OKP untuk seluruh provinsi di Tanah Papua. 2. Kesepakatan bahwa setiap provinsi harus menyiapkan struktur dan calon anggota Pokja untuk empat program prioritas BP3OKP. 3. Diterbitkannya regulasi resmi berupa Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-1SETBPP/JYP/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
Rencana Tindaklanjut	:	1. Melaksanakan proses rekrutmen Pokja secara bertahap di masing-masing daerah sesuai tata cara yang telah diatur.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Tahun 2026

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Rabu–Jumat, 26–28 November 2025 bertempat di Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membahas dan menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif untuk tahun 2026. 2. Meningkatkan efektivitas koordinasi antara Badan Pengarah Papua, Komite Eksekutif, dan Sekretariat dalam perencanaan program prioritas otonomi khusus. 3. Menyusun langkah strategis dan terarah untuk pelaksanaan program kerja pada sisa tahun 2025 serta tahun 2026.
Peserta Kegiatan	:	• Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • Kepala Sekretariat BPP Manokwari • Enam Anggota Badan Pengarah Papua • Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua • Empat Anggota Komite Eksekutif • Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	• Tercapainya kesepahaman dalam memperkuat sinergi antara Badan Pengarah Papua, Komite Eksekutif, dan Sekretariat BPP untuk meningkatkan efektivitas program otonomi khusus. • Tersusunnya arah kebijakan dan prioritas kerja untuk sisa tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026. • Dilakukannya penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama pada Kamis, 27 November 2025
Rencana Tindaklanjut	:	1. Menindaklanjuti poin-poin kesepakatan dalam Berita Acara untuk memastikan sinkronisasi program antara Badan Pengarah, Komite Eksekutif, dan Sekretariat. 2. Menyusun rencana kerja final tahun 2026 yang terukur, realistis, dan sesuai prioritas pembangunan Otsus. 3. Melakukan koordinasi teknis antar perwakilan BP3OKP provinsi dan Komite Eksekutif untuk menyelaraskan implementasi program di lapangan. 4. Menyiapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja pelaksanaan SHEK dalam program-program BP3OKP. 5. Menyampaikan laporan resmi pelaksanaan Rakor kepada pimpinan terkait sebagai dasar tindak lanjut kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Selasa–Kamis, 03–05 November 2025, bertempat Gedung Keuangan Negara, Manokwari
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Melaksanakan fungsi BP3OKP dalam Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). • Membahas arahan strategis pembangunan Otonomi Khusus Papua dari Presiden dan Wakil Presiden RI. • Meningkatkan koordinasi antara BP3OKP, Komite Eksekutif, dan pemangku kepentingan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Otsus Papua. • Merumuskan langkah percepatan pembangunan Papua berdasarkan data, fakta lapangan, dan indikator pembangunan nasional. • Memperkuat komitmen seluruh pihak untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	:	• Wakil Presiden Republik Indonesia • Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia • Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) • Sepuluh Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua • Gubernur Provinsi Papua Barat • Kepala Sekretariat BP3OKP • Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan	:	SHEK

yang di laksanakan		
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Rapat Pleno Nasional BP3OKP yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. - Wapres memberikan arahan strategis terkait percepatan pembangunan Papua, antara lain: - Akselerasi pembangunan harus dua kali lipat lebih cepat. - Inovasi kebijakan harus lebih kuat dan berbasis data. - Manfaat program Otsus harus nyata dan dirasakan masyarakat. - Penyampaian evaluasi dan indikator penting pembangunan pada empat pilar: - Papua Sehat: umur harapan hidup, stunting, fasilitas kesehatan, dokter & perawat, pelayanan kesehatan gratis, pembangunan 24 RS dalam RPJMN. - Papua Cerdas: harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, partisipasi SMP–SMA sebagai penentu IPM. - Papua Produktif: angka kemiskinan, pengangguran terbuka, inflasi, serapan belanja daerah. - Papua Damai/Polhukam: menjaga keamanan dan stabilitas yang kondusif. - Penegasan pentingnya sinergi BP3OKP dan Komite Eksekutif sebagai dua lembaga saling melengkapi dalam percepatan pembangunan Papua. - Penekanan bahwa fokus anggaran harus jelas dan berbasis skala prioritas agar pengawasan lebih mudah dan manfaat lebih besar bagi masyarakat. - Peningkatan komitmen antara Pemerintah Pusat, BP3OKP, Komite Eksekutif, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta untuk bekerja bersama mempercepat pembangunan di Papua.
Rencana Tindaklanjut	:	Menindaklanjuti arahan Wapres RI dengan menyusun skala prioritas pembangunan tahun 2026 dan seterusnya berdasarkan data indikator sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan.

Dokumentasi Kegiatan	:	
-----------------------------	----------	--

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	•
Peserta Kegiatan	:	•
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	
Rencana Tindaklanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Rapat Kerja Mengenai Langkah Strategis Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Logistik Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu :10 November 2025 Lokasi : Gedung Aula Yudha – Jl. Hom - Hom Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Memberi kesempatan kepada para peserta selaku pelaku usaha dan terlibat langsung untuk memberi masukan, saran dan kerjasama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sector yang ada. • Memberi arahan pembangunan ekonomi untuk menunjang sektor, pangsa pasar, daya saing dan peningkatan pembangunan di semua bidang infrastruktur Papua pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	• Gubernur Provinsi Papua Pegunungan (diwakili Ast.2) • Ka.Biro Ekonomi • Ka. Perindagkop, • Para pimpinan OPD • Pimpinan BUMN/ BUMD, ketua asosiasi pedagang, pelaku Usaha
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	• Memberi output bagi para pelaku usaha diberbagai sector ekonomi untuk bisa lebih aktif dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi • Kolaborasi antara pelaku usaha ekonomi dengan instansi K/L agar menghasilkan Put Income nilai ekonomi yang lebih besar, menguntungkan dan mandiri.
Rencana Tindaklanjut	:	• Kegiatan Akan selalu dimonitoring dan didorong setiap tiga bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan dengan kepala Biro dan dinas-dinas perekonomian terkait.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Dan Capacity Building TPID Se-Provinsi Papua Pegunungan 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Tanggal 11 Nopember 2025 Lokasi : Aula Gedung WIO Kantor Bupati Kab. Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Untuk mensinergikan dan mendorong penguatan ketahanan pangan dan tata kelola distribusi dalam pengendalian Inflasi di papua pegunungan yang lebih efektif dan terkontrol dengan baik. • Membantu control dan monitoring Inflasi daerah yang selama ini menempati posisi diatas secara nasional. • Memperkuat kelembagaan, berkolaborasi dan sinergitas sesama OPD serta pemerintah agar Inflasi kedepan bisa lebih terkendali dengan baik.
Peserta Kegiatan	:	• Gubernur provinsi PP (diwakili Staff Ahli SDM Bp. Aaron wanimbo) • Wakil Bupati kabupaten Jayawijaya • Para Kepala OPD • Kepla BI Prov. Papua • Perwakilan badan ketahanan Pangan Nasional Jakarta • Biro Perekonomian, BUMN/BUMD, LSM, Toga, Tokoh Masyarakat dan Para pelaku usaha.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	• Memberi output bagi Pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan Inflasi dan menjaga stabilitas ketahanan Pangan di Papua Pegunungan . • Kolaborasi, pemantauan dan pengawasan antar Pelaku usaha, instansi K/L, Perbankan, pemerintah dan masyarakat agar sama-sama bisa mengendalikan Inflasi dan menstabilaskan ketahanan pangan daerah.

Rencana Tindaklanjuti	:	- Kegiatan Akan selalu didorong, dimonitoring dan dikawal setiap tiga bulan sekali - Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan lebih aktif lagi ke pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Kunjungan, Pemantauan Dan Monitoring Ke Lapangan Untuk Pengendalian Inflasi Dan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Natal Dan Tahun Baru Di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Tanggal 13,14, 17, 18 November 2025 Lokasi : Gudang Barang Bandara Cargo, Ruang Kadis Perindagkop, kadis Sosial Dan Ruang Kepala Bank Papua di prov.PP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	- Untuk memastikan, memantau dilapangan, mensinergikan dan mendorong penguatan ketahanan pangan dan tata kelola distribusi dalam pengendalian Inflasi di papua pegunungan yang lebih efektif dan terkontrol dengan baik. - Membantu control dan monitoring Inflasi dan Ketahanan Pangan daerah yang selama ini menempati posisi diatas secara nasional. - Memperkuat kelembagaan, berkolaborasi dan sinergitas sesama OPD serta pemerintah agar Inflasi dan ketahanan pangan kedepan bisa lebih terkendali dengan baik.
Peserta Kegiatan	:	Kepala Perindagkop provinsi PP, Kadis Sosial Provinsi PP, Kepala Bank Papua dan Komandan Lanud Wamena serta KORSEK AURI wilayah timur di Biak.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Memberi output bagi Pelaku pasar, Pemerintah dan masyarakat dengan bersama-sama dalam mengendalikan Inflasi dan menjaga stabilitas ketahanan Pangan di Papua Pegunungan.

		• Kolaborasi, pemantauan dan pengawasan antar Pelaku usaha, instansi K/L, Perbankan, Stake holder, pemerintah dan masyarakat agar sama-sama bisa mengendalikan Inflasi dan menstabilaskan ketahanan pangan daerah.
Rencana Tindaklanjuti	:	• Kegiatan Akan selalu didorong, dimonitoring dan dikawal setiap tiga bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan lebih aktif lagi ke pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Lanjutan Kick Off Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu :26 November 2025 Lokasi : Gedung Aula AITHOSA LANTAI 2 Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Menentukan dan Memberi kesempatan kepada para peserta dalam menentukan penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup strategis) untuk menuju RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) tahun 2025 – 2029 Prov.PP. • Memberi masukan, bahan dan arahan kepada Pokja KLS dan pemerintah provinsi PP dalam penyusunan KLHS agar lebih cepat, tepat, aman dan strategis serta berdampak ramah lingkungan.
Peserta Kegiatan	:	• Gubernur Provinsi PP (diwakili Ast.3) • Kadis PUPR • Kadis LHK dan Pertanahan Prov.PP, • Para pimpinan OPD • Pimpinan LSM, tokoh adat, tokoh agama, kepala kampung dan Pimpinan Distrik.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif

Hasil Kegiatan	:	• Memberi output bagi para peserta, masyarakat dan pemerintah dalam penyusunan isu strategis KLHS – RPJMD Prov.PP • Kolaborasi antara para peserta dalam menentukan isu pembangunan yang berkelanjutan Strategis dalam waktu jangka panjang RIPP 2025 - 2045.
Rencana Tindaklanjut	:	• Penyusunan Kegiatan Akan selalu dimonitoring dan didorong dengan instansi terkait. • Penyusunan Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan pemerintah provinsi agar isu strategis ini bisa sesuai dengan visi misi para pimpinan daerah.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Forum Group Discussion (FGD) Kurikulum Noken Berbasis Komunitas Pendidikan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Kamis–Sabtu, 20–22 November 2025, bertempat di Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan Kurikulum Noken berbasis komunitas pendidikan. • Mengintegrasikan nilai budaya lokal Papua, khususnya <i>noken</i> sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO, ke dalam pembelajaran sekolah. • Memperkuat pelestarian budaya melalui pendekatan pendidikan kontekstual. • Menghimpun pandangan, masukan, serta praktik budaya dari para pemangku kepentingan untuk memastikan kurikulum yang relevan dan aplikatif
Peserta Kegiatan	:	• Perwakilan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan (Pokja Papua Cerdas) • Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua • Pokja Papua Cerdas Provinsi Papua Pegunungan • Ketua Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Papua • Perwakilan dari 4 Provinsi di Tanah Papua • Sekretaris Daerah Provinsi Papua • Sekretaris Bappenda Provinsi Papua • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua • Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura • Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura • Perwakilan akademisi • Mitra pendidikan dan organisasi pendukung • Perwakilan masyarakat adat (sanggar pengrajin noken) • Perwakilan GTK (Pengawas), guru, tenaga kependidikan • Perwakilan kepala sekolah
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	• Tersusunnya pemahaman bersama tentang urgensi pelestarian noken sebagai bagian penting peradaban dan kehidupan masyarakat Papua. • Pemaparan nilai filosofis noken oleh pengrajin noken, yang menegaskan bahwa noken bukan sekadar karya

		seni, tetapi simbol kehidupan, penyelesaian masalah, dan identitas budaya Papua. • Deklarasi Noken Papua, yang berisi komitmen untuk mengembangkan kreativitas dan kearifan lokal serta mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan. • Identifikasi mata pelajaran yang akan memuat integrasi nilai budaya noken, antara lain: ○ IPAS ○ Seni Budaya ○ Muatan Lokal • Kesepakatan untuk memulai konservasi pembibitan tanaman bahan baku noken sebagai bagian dari pembelajaran dan pelestarian budaya. • Menghasilkan poin-poin awal penyusunan dan <u>penyelarasan kurikulum berbasis komunitas pendidikan</u>
Rencana Tindaklanjut	:	1. Penyusunan draft kurikulum Noken Berbasis Komunitas Pendidikan oleh tim teknis BGTK, Pokja, dan mitra terkait. 2. Koordinasi lanjutan dengan BP3OKP, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk harmonisasi kurikulum. 3. Pelaksanaan workshop lanjutan untuk uji konsep dan penyelarasan konten kurikulum dengan kebutuhan sekolah. 4. Pengembangan program konservasi bahan baku noken, bekerja sama dengan komunitas adat dan sanggar pengrajin. 5. Sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai tahap awal implementasi Kurikulum Noken. 6. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum berbasis budaya lokal secara berkala.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Kesehatan Lingkungan Keluarga, Penimbangan dan Pengukuran Bayi–Balita Program PPA, Pengobatan Massal, dan Pemberian Makanan Bergizi
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 November 2025, bertempat di Tempat Pelayanan PPA Posyandu Kampung Algonik, Distrik Pyramid
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan lingkungan keluarga. • Melakukan penimbangan dan pengukuran berat badan serta tinggi badan bayi dan balita Program PPA. • Memberikan layanan pengobatan massal kepada masyarakat. • Meningkatkan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan bergizi. • Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah kampung dalam mendukung pelayanan posyandu.
Peserta Kegiatan	:	• Gaad Piranid Tabuni – Anggota BP3OKP Pokja Papua Sehat • Frans Komba – Hamba Tuhan GKII Rehobot Algonik • dr. Sonya Logo dan 2 dokter narasumber • Suster Naipora Tabuni & Tiomkwe Wenda – Tenaga Posyandu • Kepala Desa Algonik dan Kepala Desa Yalinggume • Sekretaris Kampung, Bapak Derek Tabuni • Masyarakat peserta kegiatan sebanyak 40 orang
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Sosialisasi Kesehatan Lingkungan Keluarga • Penyampaian materi tentang pemberian ASI dan makanan tambahan bagi bayi dan balita. • Edukasi kesehatan lingkungan: makanan bergizi, mandi teratur, minum air matang, pakaian bersih, dan pola tidur sehat (tidak di loteng Honai), serta perilaku hidup bersih lainnya. Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Massal • Pemeriksaan kesehatan umum bagi 20 pasien. • Pengobatan luka, pemeriksaan tensi darah, dan pemberian obat gratis.

		• Penanganan langsung oleh dr. Sonya Logo dan dua dokter narasumber, dibantu oleh tenaga posyandu. Penimbangan & Pengukuran BB/TB • 8 bayi–balita hadir dan berhasil diukur. • 7 bayi–balita tidak hadir. Pemberian Makanan Bergizi • Susu + bubur kacang hijau untuk bayi-balita yang hadir (4 orang). • Makan siang bergizi untuk seluruh 40 peserta kegiatan. Dukungan Pemerintah Kampung • Kepala Kampung memberikan dukungan dana Rp 10.000.000 untuk penguatan kegiatan posyandu.
Rencana Tindaklanjut	:	1. Pembinaan gizi keluarga, khususnya edukasi agar bayi tidak diberi makanan tambahan sebelum usia 6 bulan. 2. Peningkatan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat. 3. Pengadaan tambahan obat-obatan, mengatasi kekurangan obat pada pelayanan sebelumnya. 4. Pelaksanaan sosialisasi lanjutan pada bulan Desember melalui undangan resmi. 5. Pemanfaatan dana Rp 10.000.000 dari Kepala Kampung untuk memperkuat sarana posyandu dan kegiatan gizi. 6. Pemantauan perkembangan bayi–balita yang tidak hadir pada sesi penimbangan sebelumnya.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan,"Koordinasi pokja Papua Sehat dengan Kepala Kantor BPS Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Selasa, 25 November 2025 Jam 14:30 – 16:00 WIT Ruang Kerja Kepala Kantor BPS Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Koordnasi tentang pendataan melalui koordinasi dan diskusi dalam pelaksanaan kegiatan tentang; ◦ Standard dan prosedur pendataan pelayanan kesehatan ◦ Standard dan prosedur pendataan pelayanan Pendidikan ◦ Standard dan prosedur pendataan pelayanan kesejahteraan masyarakat. • Standar IPM, UHH, dan Pendataan Khusus Kesehatan • Pendataan Orang Asli Papua tahun 2025
Peserta Kegiatan	:	• Marthen L. Purmiasa; Kepala kantor BPS Kabupaten Jayawijaya • Gaad P. Tabuni; Pokja Papua Sehat BP3OKP Prov. Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	• Kepastian prosedur pendataan dalam program pembangunan kesehatan dalam 3 aspek kehidupan manusia (by name & by address) berbasis kepastian data terpaduh karena data pembangunan kesehatan, pendidikan, dan pembangunanan kesehahteraan penduduk berbasis data tidak dapat dipisahkan. • Mendapatkan dasar kerja data IPM, UHH, dan Pendidikan menjadi tolak ukur pembangunan di Prov. Papua Pegunungan dan di 8 kabupaten. • Mengetahui garis besar factor indicator penyebab dalam pelaksanaan tusi Pokja Papua Sehat terwujud Sinkronisasi, Haromonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi kerja berbasis data BPS dan Sektor-sektor Pembangunan di Pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan.
Hasil Kegiatan	:	Penjelasan Kaban BPS tentang proses: ◦ Pendataan bidang kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata ◦ Penerapannya di provinsi Papua Pegunungan dan baru memulai sesuai prosedur di Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara, dan Kab. Mamberamo Tengah dan diskusi dan tanya jawab.

		Pendataan 3 serangkai pembangunan yang bersifat komplementer yaitu: ○ Proses pendataan pembangunan pendidikan ○ Proses Pendataan Pembangunan Kesehatan ○ Proses Pendataan Pembangunan Kesejahteraan Tidak mungkin pembangunan berhasil tanpa satu unsur saja di antara 3 aspek pembangunan (diskusi dan tanya jawab) • Waktu pendataan ➤ Pendataan penduduk dilakukan siklus 10 tahun/ berakhir angka yaitu 10/sekali, contohnya 2010, 2020, 2030 ➤ Pendataan pertanian dilakukan siklus tahun berangka akhir 3, yaitu; 1993, 2003, 2013, 2023, 2033 ➤ Pendataan Ekonomi dilakukan sekali/10 tahun berangka belakang 6 dan sudah 7x hingga saat ini, yaitu tahun 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2016, 2026 • Angka IPM – Provinsi Papua Pegunungan di banding angka IPM Nasional: ○ IPM sangat terendah dan tidak terlepas dari factor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terhambat/menentuh ○ Usia Hapan Hidup (UHH) ○ Derajat Kesehatan ○ Tingkat Pendidikan • IPM Provinsi Papua Pegunungan 54,91 di tahun 2024 dan tahun 2025 IPM 8 Kabupaten Prov. Papua Pegunungan 54,91/75,90 Nasional (pertumbuhan 1,36%) ○ Harapan Lama Hidup 75,15 ○ Harapan lama Sekolah 9,97/13,21. • IPM : ○ Provinsi Papua Pegunungan: 54,91 artinya naik 0,48 ○ Kabupaten Jayawijaya 69,00
Rencana Tindaklanjut	:	• Akan jadwalkan untuk koordinasi lanjutan tahun 2026 bersama 4 Pokja anggota BPP

		• Akan ikut memback-up pendataan Orang Asli Papua (OAP) melalui pembuatan regulasi melalui MRP, DPRP, dan Gubernur – BP3OKP dan BPS menjadi pendampingan percepatan perwujudan dasar hukum pendataan OAP • Sosialisasi bersama kepada Bupati, Gubernur dan pemimpin eselon, bahwa dalam rangka pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi wajib berbasis data dan analisis kerja, yang bersifat kemutlakan dan bersifat wajib, sebab BPS bekerja berbasis laporan data sektor hasil pembangunan pemerintah.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pokja Papua Sehat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya mengenai implementasi Program MBG dan Penanganan Penyakit HIV AIDS Serba-serbi
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kamis, 27 November 2025 Pukul 16:00 – 17:00 WIT Ruang Kerja Sekda Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Percepatan implementasi program MBG di kota Wamena • Penanganan penyakit HIV di kabupaten Jayawijaya melalui organisasi KPA dalam rangka penawaran revalensi kasus HIV yang memprihatinkan dengan data kasus yang terus meningkat • Pembahasan percepatan proses regulasi keahlian OAP sebagai dasar pendataan demi kepastian penduduk basis penggunaan otsus.
Peserta Kegiatan	:	• Gaad P. Tabuni; Pokja Papua Sehat BP3OKP Prov. Papua Pegunungan. • Petrus Mahuse; Pj. Sekda Kabupaten Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK

Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Menyepakati koordinasi lebih lanjut dalam percepatan terhadap: • Dapur SPPG dilaksanakan di Wamena melalui aksi langsung berdasarkan regulasi dan mengatur aksi lapangan khusus Orang Asli Papua ○ Akan memanggil koordinasi MBG di Provinsi dan Kabupaten untuk strategi di kebijakan dengan pemerintah daerah ○ Diprioritaskan SPPG di laksanakan oleh Orang Asli Papua Jayawijaya. ○ Akan rapat-rapat tindak lanjut secara berkala • Penanganan Kasus HIV Rapat koordinasi OPD terkait dengan BP3OKP di pimpin Sekda awal tahun 2026 untuk membukakan: ✓ Organisasi Komisi Penanggulangan HIV AIDS ✓ Memyusun rencana kerja ✓ Keterlibatan SKPD/OPD terkait ✓ Pembiayaan ✓ Bentuk team pelaksanaan lapangan • Akan melakukan koordinasi tindak lanjut percepatan regulasi Perdasi/Perdasus Pendataan Orang Asli Papua (OAP) – melalui tahapan proses-proses pembahasan melalui MRP, DPRP dan Gubernur.
Rencana Tindaklanjut	:	• Membangun komunikasi dan koordinasi aktif demi terwujudnya kegiatan 3 aspek bahasan diatas melibatkan semua komponen yang berkompeten. • Tertip rencana pembentukan dapur SPPG di kelolah oleh Orang Asli Papua (OAP) akan dibicarakan segera. • Pembahasan penanganan kasus HIV akan dibahas di awal bulan tahun 2026.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di Lingkungan Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Pada hari Jumat, 14 November 2025 Jam 09:00 s.d Selesai Baliem Hotel Pilamo Wamen
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mempercepat Pendataan Orang Asli Papua (OAP) melalui mekanisme pendataan standard tahapan proses pendataan dan manfaatnya.
Peserta Kegiatan	:	• Staff Ahli Gubernur Provinsi Papua Pegunungan • Kepala OPD Provinsi Dinas Terkait • Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Bersama Pokja Papua Sehat • Pimpinan K/L dari Papua di Kabupaten • 2 Orang nara sumber dari Provinsi Papua • Kepala Dinas Dukcapil dari 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dan staff • Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LMA, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	• Penyampaian materi oleh narasumber Dinas Dukcapil Provinsi Papua Pegunungan • Diskusi tentang kendala dan masalah serta hasil penghambatan dari 8 Kabupaten • Materi sosialisasi: ○ Pendataan OAP dan prosedur pendaftaran data kependudukan oleh Marhen Imbenai, S.Sos., M.M. ○ Pendataan Orang Asli Papua (OAP) ○ Pendataan Penduduk Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Pegunungan. • Pengarah BP3OKP memberikan upaya percepatan yang sedang dilakukan melalui koordinasi ke pihak MRP dan Sekda Provinsi Papua Pegunungan
Rencana Tindaklanjuti	:	• Akan mengadakan koordinasi dengan Gubernur dan DPRD dan MRP dalam rangka mempercepat merancang regulasi perdasu dan perdasus sebagai basis pendataan OAP

Dokumentasi Kegiatan	:	
-----------------------------	----------	--

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

Wamena, 8 Desember2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



HANTOR MATUAN, S.IP